

## Mahasiswa Sebagai Agen Kebenaran dalam Usaha Menciptakan Kelancaran Pemilu 2024 Di Indonesia Berdasarkan Kebenaran René Descartes

**Septian<sup>1</sup>**

Sekolah Tinggi Filsafat Widya Sasana  
[septianmsds@gmail.com](mailto:septianmsds@gmail.com)

**Armada Riyanto<sup>2</sup>**

Dosen Sekolah Tinggi Filsafat Widya Sasana  
[fxarmadacm@gmail.com](mailto:fxarmadacm@gmail.com)

**Mathias Jebaru Adon<sup>3</sup>**

Dosen Sekolah Tinggi Filsafat Widya Sasana  
[mathiasjebaruadon@gmail.com](mailto:mathiasjebaruadon@gmail.com)

***Abstract:** The focus of this paper is to discuss the role of students as agents of truth in an effort to encourage the smooth running of the 2024 General Elections in Indonesia, with reference to the concept of truth according to René Descartes. Through an interdisciplinary approach that combines philosophy and political context, this research considers how Descartes' view of truth can be applied by students to facilitate a fair and transparent election process. Through conceptual analysis and mapping the application of Descartes' ideas, this research explores how students can use the concept of truth to encourage ethical political participation, fight for justice, and minimise uncertainty in the democratic process, especially in the 2024 General Election. This research highlights the important role of students as actors as well as thought leaders who bring positive changes and foster public trust, so that fraud and injustice do not occur in the 2024 Election process in Indonesia.*

***Keywords:** Students, truth, Election 2024, René Descartes, justice*

### PENDAHULUAN

Pemilu merupakan salah satu bentuk fondasi demokrasi yang memungkinkan partisipasi aktif warga negara dalam menentukan arah masa depan suatu negara. Maka, dapat dimengerti bahwa demokrasi merupakan sebuah metode politik, sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin politik (Sorensen, 2015). Di Indonesia, Pemilu 2024 akan menjadi momen krusial dalam perjalanan demokrasi, yang akan menentukan kepemimpinan dan pandangan politik yang akan memengaruhi arah bangsa Indonesia selanjutnya. Namun, seiring dengan pentingnya momen ini, pelaksanaan Pemilu juga sering kali menimbulkan kecemasan dalam masyarakat, memunculkan ketidakpastian dan konflik yang berpotensi

mengganggu kelancaran proses demokrasi. Walaupun pada mulanya demokrasi mengalami kemajuan, tetapi demokrasi berkembang melalui jalan yang tidak menjadi pertanda baik bagi konsolidasi demokrasi lebih lanjut. Hasil yang dicapai mungkin hanya sebuah kebuntuan demokrasi di mana demokrasi yang lemah dan tidak solid gagal memenuhi harapan dan janji-janji yang dibebankan oleh sebagian besar penduduk (Sorensen, 2015).

Sebagai kaum intelektual dan anggota masyarakat yang punya nilai tambah, mahasiswa mampu memerankan diri secara profesional dan proporsional di masyarakat ataupun di dunia Pendidikan (Cahyono, 2019). Dalam konteks Pemilu 2024 di Indonesia, relevansi mahasiswa sebagai agen perubahan dan pencetus kebenaran sangat

diperlukan. René Descartes, seorang filsuf yang dikenal dengan kontribusinya terhadap gagasan kebenaran dan metode rasional, menyuguhkan perspektif yang dapat menjadi landasan bagi partisipasi aktif mahasiswa dalam menjaga integritas Pemilu. Descartes memandang kebenaran sebagai hasil dari pemikiran yang rasional dan skeptis, memberikan landasan filosofis yang kuat untuk diadopsi dalam konteks kemasyarakatan, termasuk dalam proses demokrasi.

Penerapan konsep Descartes tentang kebenaran kepada mahasiswa dalam konteks Pemilu 2024 di Indonesia membutuhkan pemikiran yang mendalam dan analisis yang cermat. Bagaimana mahasiswa dapat menggunakan landasan filosofis ini untuk memfasilitasi proses Pemilu 2024 yang adil, transparan, dan berintegritas? Dan bagaimana konsep kebenaran Descartes dapat menjadi panduan bagi mahasiswa untuk menumbuhkan partisipasi politik yang beretika dan bertanggung jawab?

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Melalui pendekatan analitis dan konseptual yang memadukan filsafat dengan realitas politik di Indonesia, tulisan ini akan menguraikan bagaimana peran mahasiswa sebagai agen kebenaran dapat menggali pemikiran Descartes untuk menciptakan Pemilu 2024 yang lebih lancar dan berintegritas. Tulisan ini juga akan menyoroti pentingnya peran mahasiswa sebagai inisiator perubahan yang tidak hanya mendukung proses demokrasi tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat pada integritas Pemilu.

Melalui kajian mendalam tentang konsep kebenaran Descartes yang diterapkan dalam konteks Pemilu 2024 di Indonesia, penulis berharap dapat memberikan landasan teoritis dan pandangan praktis bagi mahasiswa untuk menjadi agen positif dalam menjaga kebenaran dan integritas proses demokrasi. Hal ini diharapkan akan menghasilkan

partisipasi politik yang beretika, mendorong keadilan, dan memperkuat fondasi demokrasi di Indonesia.

## METODE

Untuk menguraikan artikel ini, penulis menggunakan metode studi literatur untuk mendalami konsep-konsep kebenaran menurut Rene Descartes yang relevan dengan konteks mahasiswa yang memiliki peran sebagai agen kebenaran dalam Pemilu 2024 di Indonesia. Langkah pertama adalah mengidentifikasi karya-karya Descartes yang membahas tentang kebenaran, skeptisisme, dan proses mencari kebenaran dengan menggunakan metode keraguan metodis. Selanjutnya, penelitian ini menyelidiki literatur yang berkaitan dengan partisipasi mahasiswa dalam proses politik, khususnya dalam Pemilu. Analisis literatur berfokus pada peran mahasiswa sebagai agen yang memperjuangkan kebenaran dalam proses politik serta bagaimana kebenaran menurut pandangan Descartes dapat diaplikasikan dalam konteks ini.

Metode literatur akan memperoleh informasi dari berbagai sumber untuk membangun argument yang kokoh tentang bagaimana mahasiswa dapat menjadi agen kebenaran dalam konteks Pemilu 2024 di Indonesia. Penelitian ini akan mendalami pandangan Descartes mengenai kebenaran untuk menawarkan strategi yang dapat diambil oleh mahasiswa guna menciptakan kelancaran Pemilu berdasarkan hukum dan prinsip-prinsip kebenaran Descartes. Dengan menggabungkan konsep-konsep kebenaran Descartes dengan peran mahasiswa dalam Pemilu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan baru tentang bagaimana para kaum muda dapat memengaruhi proses politik dengan landasan filosofis yang kuat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pemikiran strategis untuk melibatkan para

mahasiswa dalam menciptakan Pemilu yang lebih berintegritas dan berkeadilan dengan bersumber pada prinsip kebenaran.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Mahasiswa sebagai Agen Kebenaran dan Perubahan

Mahasiswa merupakan bagian integral dari masyarakat yang memegang peranan penting dalam menggerakkan perubahan sosial dan politik di suatu negara. Mahasiswa merupakan kelompok intelektual muda dalam masyarakat yang dididik dalam berbagai bidang keilmuan dan keterampilan, diharapkan dapat mengadvokasi masyarakat sesuai keahliannya masing-masing (Adon, 2021). Peran mahasiswa tidak hanya terbatas dalam proses akademis di kampus, tetapi mereka juga harus mampu memperluas cakupan keterlibatan mereka dalam merumuskan arah perubahan sosial-politik di lingkungan sekitar (Cahyono, 2019). Mahasiswa harus mampu bersikap kritis dalam menilai benar-salahnya suatu kebijakan. Yang benar harus didukung, dan yang salah harus diluruskan. Inilah yang dimaksud mahasiswa sebagai agen kebenaran.

Dalam konteks sosial-politik, mahasiswa memiliki potensi besar sebagai agen perubahan atau yang biasa disebut *agent of change*. Mereka kerap kali menjadi pemicu dan penggerak perubahan dalam masyarakat. Ide dan pemikiran cerdas seorang mahasiswa mampu merubah paradigma yang berkembang dalam suatu kelompok masyarakat dan menjadikannya terarah sesuai kepentingan bersama. Sikap kritis mahasiswa sering membuat sebuah perubahan besar dan membuat para pemimpin yang tidak berkompoten menjadi gerah dan cemas. Dan satu hal yang menjadi kebanggaan mahasiswa adalah semangat membara untuk melakukan sebuah perubahan (Cahyono, 2019). Hal ini tidaklah mengherankan, karena mahasiswa adalah

kaum terpelajar dan memiliki wawasan yang luas untuk mengkritisi ketidakadilan sosial dan masalah-masalah politik yang ada. Mereka tidak hanya menerima materi-materi perkuliahan tentang demokrasi, tetapi mereka juga mempraktikkannya dalam masyarakat.

Salah satu peran utama mahasiswa adalah sebagai penjaga moralitas dan penegak keadilan dalam masyarakat. Dalam menjalankan perannya mahasiswa perlu menyadari bahwa masyarakat adalah kelompok sosial yang berada pada strata sosial bawah yang umumnya masih merupakan masyarakat yang tidak terdidik (Adon, 2021). Oleh sebab itu, mahasiswa harus berjuang untuk mewakili suara-suara dan aspirasi masyarakat yang tidak terdengar, memperjuangkan hak-hak yang dinilai terpinggirkan, serta menegakkan prinsip-prinsip demokrasi dan transparansi dalam sistem politik. Dengan pemikiran yang kritis dan analitis, mahasiswa dapat menyuarakan aspirasi masyarakat yang terpinggirkan.

Mahasiswa juga berperan dalam memperjuangkan hak-hak asasi manusia dan mengawal kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Apabila kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dinilai baik, maka mahasiswa harus mendukungnya. Sebaliknya, apabila kebijakan-kebijakan tersebut tidak progresif atau tidak memihak pada kepentingan rakyat, maka mahasiswa harus menyuarakan aspirasi yang mengutamakan kepentingan rakyat. Kerap kali mereka turut aktif dalam aksi-aksi protes, diskusi-diskusi publik, dan kampanye-kampanye untuk mengubah kebijakan pemerintah yang dianggap kurang progresif.

Selain itu, mahasiswa juga menjadi agen kebenaran dan perubahan dalam membangun kesadaran politik di kalangan masyarakat. Mahasiswa seringkali menjadi pelopor diskusi-diskusi yang memperluas pemahaman politik masyarakat, membantu meningkatkan partisipasi dalam proses

demokrasi, dan memberikan motivasi kepada generasi muda untuk terlibat secara aktif dan positif dalam kehidupan politik negara. Adapun peran, tanggung jawab, dan hak generasi muda, yaitu berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional (Sukmawati dan Al Rafni, 2020).

Namun, potensi mahasiswa sebagai agen kebenaran dan perubahan juga tidak terlepas dari tantangan. Beberapa di antaranya adalah polarisasi ideologi, tekanan sosial, dan kendala-kendala birokrasi dalam lingkungan kampus. Polarisasi ideologi dapat memecah belah kesatuan gerakan mahasiswa, sedangkan tekanan sosial bisa menjadi penghambat bagi mahasiswa yang ingin mengambil sikap kritis terhadap suatu permasalahan. Kendala birokrasi di lingkungan kampus juga dapat menjadi penghambat bagi pergerakan mahasiswa untuk melakukan perubahan yang ingin mereka capai. Guna menghadapi tantangan-tantangan tersebut, maka gerakan mahasiswa perlu menciptakan cita-cita bersama bangsa yang menjadi landasan pergerakan, dengan pemikiran dan diskusi yang lebih mendalam. Cita-cita bersama ini harus sederhana namun dapat merangkul semua kepentingan rakyat (Akbar, 2016).

Dengan demikian, peran mahasiswa dalam konteks sosial-politik sangatlah penting. Potensi mereka untuk menjadi agen kebenaran dan perubahan harus tetap dipertahankan melalui Pendidikan, pengembangan pemikiran kritis, dan pembekalan nilai-nilai moral yang kuat. Mereka harus mampu menghadapi berbagai tantangan dan tetap konsisten menjadi pelopor masyarakat, memberikan perubahan-perubahan yang berdampak positif dalam kehidupan masyarakat, serta menanamkan nilai-nilai positif dalam masyarakat (Martadinata, 2019). Oleh sebab itu, mahasiswa memiliki tanggung jawab yang besar sebagai bagian dari elemen penting

dalam proses perubahan sosial-politik yang positif. Dengan pengabdian dan keberanian untuk bergerak, mereka dapat menjadi garda terdepan dalam menciptakan perubahan positif yang signifikan untuk memajukan kehidupan sosial dan politik suatu bangsa.

### **Kebenaran Menurut René Descartes**

Pemahaman tentang kebenaran menurut René Descartes serta metode keraguan dan relevansinya sudah menjadi sorotan dalam sejarah filosofi yang mendalam. René Descartes merupakan seorang filsuf besar pada abad ke-17, yang terkenal dengan usahanya dalam mencari fondasi yang kokoh untuk pengetahuan manusia. Pandangan Descartes tentang kebenaran diawali dengan penekanannya pada ketidakpastian dan kehati-hatian yang mendalam. Ia mengembangkan metode keraguan yang radikal untuk mencapai kebenaran yang pasti. Descartes meyakini bahwa berbagai pengetahuan yang dipelajari manusia sehari-hari didasarkan pada keyakinan yang tidak pasti. Untuk itulah ia mencetuskan metode keraguan, menolak segala sesuatu yang tidak dapat dipastikan secara mutlak.

Metode keraguan Descartes melibatkan sikap untuk meragukan segala pengetahuan yang ia terima dari indera dan pengalaman sehari-hari. Pengalaman inderawi tidak bisa dipercaya sebagai sumber pengetahuan yang sejati. Menurutnya, pengalaman inderawi seringkali menampilkan kesan tidak seperti hakikat realitas tersebut. Pengalaman inderawi bisa saja menipu melalui ilusi inderawi manusia (Faradi, 2019). Ia meragukan segala hukum dan tampilan inderawi yang disaksikan oleh indera manusia. Keraguan atas segala hal semacam itu merupakan sebuah keniscayaan jika manusia hendak menemukan pengetahuan yang sejati. Melalui apa yang disebut sebagai 'keraguan metodis', Descartes merumuskan diktum utamanya, "*Cogito ergo sum*, aku berpikir maka aku

ada” (Russell, 2014). Ia menempatkan dirinya dalam posisi skeptis terhadap segala sesuatu yang dapat diragukan, termasuk dalam realitas dunia fisik, keberadaan benda-benda, bahkan keberadaan Tuhan. Tujuan utamanya adalah untuk memperoleh kebenaran yang tidak dapat diragukan lagi, yang merupakan dasar dari pengetahuan yang mutlak.

Relevansi dari metode keraguan Descartes terletak pada perhatiannya pada kehati-hatian dan pemikiran yang kritis. Meskipun pada praktiknya tidak mudah untuk meragukan segala sesuatu, pemikiran ini mengajarkan kepada setiap orang untuk tidak langsung menerima apa yang tampak atau yang didengar, melainkan harus lebih dahulu melakukan proses evaluasi dan refleksi yang mendalam terhadap pengetahuan yang ada. Dengan demikian, pengetahuan yang diperoleh dapat menjadi lebih pasti dan akurat. Pengetahuan yang dianggap pasti dan akurat tentu saja adalah pengetahuan yang selaras dengan pengetahuan lain yang sudah terbukti dari pengalaman sebelumnya (Faradi, 2019).

Berbagai kritik muncul terhadap metode keraguan Descartes. Beberapa berpendapat bahwa seringkali metode ini kuat dalam mempertanyakan segala sesuatu, dan juga menempatkan manusia dalam paradoks ketidakpastian yang sulit untuk menemukan jalan keluar. Tidak mungkin bagi seseorang untuk hidup dalam keraguan mutlak dalam kehidupan sehari-hari, yang ada hanya akan menimbulkan kesulitan tanpa adanya solusi.

Pandangan Descartes tentang kebenaran di sisi lain menempatkan penekanan pada pengetahuan yang pasti dan universal. Baginya, kebenaran yang mutlak dapat ditemukan melalui kecerdasan akal budi manusia dan pemikiran yang jernih. Descartes menyebut diktum “*Cogito ergo sum*” sebagai landasan dari pengetahuan

yang mutlak, menjadikan eksistensi diri sebagai titik awal yang tidak dapat dibantah.

Penerapan pandangan Descartes tentang kebenaran dalam konteks modern terletak pada penekanan terhadap pentingnya rasionalitas dan penggunaan akal sehat dalam mencapai pengetahuan yang kokoh. Meskipun paradigma epistemologi sudah berkembang sejak zamannya, sumbangannya dalam menekankan peran pemikiran kritis dan penalaran yang mendalam tetap relevan hingga saat ini. Dapat disimpulkan bahwa pemahaman terhadap pandangan Descartes tentang kebenaran serta metode keraguan yang digunakannya memberikan wawasan yang penting mengenai perlunya mempertanyakan dan meneliti segala sesuatu sebelum menerimanya sebagai suatu kebenaran yang pasti. Meskipun tidak mudah untuk hidup dalam keadaan keraguan mutlak, relevansinya terletak pada nilai pemikiran kritis dan penggunaan akal budi untuk memperoleh pengetahuan yang lebih kuat dan akurat.

### **Tantangan Pemilu di Indonesia dari Masa ke Masa**

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Bidja, 2022). Sehubungan dengan tujuan pelaksanaan Pemilu yang mendasar tersebut, maka para penyelenggara Pemilu harus mampu menjaga kualitas Pemilu dengan menunjukkan hasil Pemilu yang berintegritas dan akuntabel, serta bersikap netral dan transparan. Namun pada kenyataannya, pelaksanaan Pemilu di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang muncul dari

pengalaman pemilu-pemilu sebelumnya. Salah satu tantangan utama dan terbesarnya adalah kesulitan dalam penegakkan hukum terkait dengan berbagai pelanggaran yang terjadi selama pelaksanaan Pemilu. Meskipun ada regulasi yang mengatur jalannya Pemilu, namun seringkali masih terjadi pelanggaran, seperti *money politics* (politik uang), intimidasi terhadap pemilih, serta penyalahgunaan kekuasaan oleh para penguasa. Para penegak hukum seringkali kesulitan dalam menindaki pelanggaran-pelanggaran seperti ini dengan cepat dan efektif, sehingga berpotensi merusak integritas Pemilu.

Dalam perjalanannya hukum sebagai produk dari para ahli dan yang mendapat legalitasnya dari negara, sehingga hukum itu bersifat artifisial, mendapat tanggapan sebagai akibat dari “jauhnya” hukum itu dari apa yang menjadi keinginan atau kepentingan masyarakat, termasuk di dalamnya kepentingan tentang keadilan, karena sifat prosesnya yang *top down* dan bersamaan dengan itu membuka peluang terjadinya hukum yang mengabdikan kepada kepentingan rezim penguasa (yang membentuknya) melalui fungsi instrumentalnya (Sumadi, 2015). Sebagai negara demokrasi, rakyat bebas memilih pemimpin yang dianggap paling baik, namun negara demokrasi juga merupakan negara yang patuh terhadap hukum. Oleh sebab itu, para penyelenggara pemilu dan para penegak hukum harus bersikap tegas dan sigap dalam menghadapi pelanggaran-pelanggaran hukum dalam proses pelaksanaan Pemilu.

Selain kasus penegakkan hukum, politik identitas juga menjadi tantangan yang signifikan dalam pelaksanaan Pemilu di Indonesia selama ini. Terlihat bahwa pemilihan seringkali dipengaruhi oleh faktor-faktor identitas seperti suku, agama, dan golongan. Hal ini menyebabkan terciptanya polarisasi dalam masyarakat dan memperkuat klaim kelompok tertentu terhadap kebijakan

dan keputusan politik. Politik identitas juga sering digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan suara sebanyak mungkin dengan cara memanipulasi sentimen dan perasaan identitas masyarakat.

Selain itu, Pemilu di Indonesia juga sering diwarnai oleh isu-isu tentang ketidaksetaraan akses dan sumber daya antarpartai. Peran partai politik dalam menegakkan demokrasi di Indonesia cukup penting. Antara lain, Partai Politik harus dapat mengadakan pendidikan politik agar masyarakat tidak saja sadar hukum tetapi juga dewasa dalam berpolitik (Santoso, 2019). Namun pada kenyataannya, Partai Politik hanya berfokus pada kepentingan untuk memperoleh suara. Partai Politik dengan keuangan yang lebih besar memiliki keunggulan dalam kampanye, sehingga menciptakan ketidaksetaraan dalam persaingan politik. Ini bisa merugikan partai-partai kecil atau independen yang mungkin memiliki *platform* atau visi yang lebih baik dibandingkan partai lainnya, namun mengalami kesulitan untuk bersaing karena sumber daya finansial yang masih sangat terbatas. Nepotisme dan perkoncoan juga sangat mengganggu mekanisme seleksi kepemimpinan dalam masyarakat. Prinsip demokrasi tentang penapisan, persaingan terbuka, dan *fairness* dalam pemilihan kader-kader pimpinan masyarakat menjadi terganggu dan bahkan bisa tidak berjalan (Amal dan Armawi, 2016). Akibatnya, pemimpin yang terpilih biasanya bukan karena kualitasnya yang baik, melainkan karena strategi partai politik yang menarik perhatian masyarakat.

Peran media juga merupakan bagian dari tantangan Pemilu di Indonesia. Media memegang peran yang sangat penting dalam menyampaikan informasi kepada publik, namun terkadang media juga dapat terpengaruh oleh kepentingan politik atau keuangan tertentu. Berita palsu atau *hoax* serta informasi yang kurang akurat dapat

merusak proses pelaksanaan Pemilu karena dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kandidat atau partai tertentu. Permasalahan saat ini adalah mengenai kurangnya pemahaman masyarakat mengenai kepemimpinan politik, khususnya para pemilih pemula di Indonesia. Sebelum pesta demokrasi berlangsung, biasanya para kandidat melakukan kampanye untuk meningkatkan elektabilitasnya, termasuk dengan penggunaan media. Apapun yang diperlihatkan oleh media, itulah yang biasanya diyakini oleh masyarakat. Oleh sebab itulah, masyarakat kerap kali terpapar hoaks, sehingga cara mereka memilih tidak bersifat objektif (Kusuma, dkk, 2022).

Selain itu, tingginya tingkat partisipasi politik yang didorong oleh isu-isu sosial, ekonomi, dan lingkungan juga menjadi tantangan. Pemilih yang tidak mendapatkan informasi secara akurat atau terpengaruh oleh pemikiran sempit dapat membuat keputusan politik yang kurang rasional. Oleh sebab itu, pendidikan politik yang memadai serta literasi informasi yang akurat sangat diperlukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat yang didorong oleh kebenaran akan pengetahuan.

Partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum menjadi tolak ukur keberhasilan pelaksanaan Pemilu. Rendahnya partisipasi dalam Pemilu dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal yakni berupa faktor teknis dan pekerjaan, sedangkan faktor eksternal yakni berupa faktor administratif, sosialisasi dan politik. Untuk itu peran partisipasi masyarakat dalam pengawasan partisipatif pemilu juga diperlukan untuk mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas (Kusuma, dkk, 2022). Dalam menjalankan peran pengawasan pemilu masyarakat dapat bekerjasama dengan lembaga pengawas pemilu seperti BAWASLU (Badan Pengawas Pemilu) untuk memastikan penyelenggaraan pemilu berjalan dengan baik (Pratama, 2019).

Masih ada banyak lagi tantangan-tantangan dan hambatan-hambatan yang seringkali dihadapi dalam proses pelaksanaan Pemilu di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa Pemilu di Indonesia memerlukan reformasi atau peningkatan dalam sistem pemilihan dan penegakkan hukum guna memastikan integritas dan keadilan. Pembangunan masyarakat yang lebih teredukasi politik, pengawasan berbagai pihak yang lebih ketat, dan perbaikan dalam distribusi sumber daya antarpolisi dapat membantu mengatasi sebagian besar tantangan tersebut. Pemilu yang adil dan transparan sangat penting untuk memastikan representasi yang akurat dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

#### **Kontribusi Mahasiswa dalam Konteks Pemilu 2024 di Indonesia**

Pemilu merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi, yang berperan untuk memastikan partisipasi warga negara dalam menentukan pemimpin dan kebijakan yang akan mengatur suatu negara. Paham demokrasi meletakkan 'rakyat' sebagai sumber kedaulatan, penyelenggara kedaulatan, dan sekaligus pengawas terhadap pelaksanaan kedaulatan (Amal dan Armawi, 2016). Demokrasi itu keseluruhan keterlibatan masyarakat dalam membangun tata kelola kehidupan bersama, dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang bermartabat, adil, sejahtera, setara di hadapan hukum (Adon, 2021). Dengan demikian, mahasiswa juga harus mengambil bagian di dalamnya, karena mahasiswa adalah bagian dari masyarakat. Dalam konteks Pemilu 2024 di Indonesia, mahasiswa memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan kebenaran, integritas, dan transparansi proses demokrasi. Mereka harus menyadari dan mengetahui bahwa tahun ini adalah momentum perubahan negeri, tahun yang menentukan nasib bangsa setidaknya untuk lima tahun ke depan (Sabiq, 2014). Dengan semangat kritis

dan kewajiban moral sebagai agen kebenaran dalam perubahan, mereka dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk menjaga integritas Pemilu di tahun 2024.

Peran utama mahasiswa dalam memastikan kebenaran dalam Pemilu 2024 adalah sebagai pengawas dan pelapor. Mahasiswa dapat membentuk kelompok pengawas independen untuk memantau proses Pemilu dari awal hingga akhir. Dalam usahanya ini mahasiswa juga dapat melibatkan kerjasama antara pemerintah dengan Perguruan Tinggi sehingga keterlibatan mahasiswa sebagai *agent of change* dapat terlaksana dengan baik (Adon, 2021). Mereka dapat mengamati pendaftaran calon pemilih, kampanye politik, dan tahapan-tahapan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di setiap TPS. Dengan terlibat secara langsung tersebut, mahasiswa dapat mengidentifikasi potensi pelanggaran dan penyimpangan yang bisa saja terjadi selama proses Pemilu 2024 mendatang.

Selain menjadi pengawas dan pelapor, mahasiswa juga dapat menggunakan keahlian teknologi mereka untuk menggali informasi dan melakukan verifikasi. Teknologi informasi dan media sosial dapat dijadikan sebagai sarana efektif untuk mengumpulkan bukti dan menyebarkan informasi terkait proses Pemilu 2024. Mahasiswa dapat melakukan pemantauan *online* terhadap berbagai sumber informasi, termasuk media massa, dan memeriksa kebenaran berita untuk memastikan tidak ada disinformasi atau manipulasi yang terjadi. Ini adalah bentuk nyata keterbukaan relasi antara mahasiswa dengan masyarakat. Apa yang didapatkan mahasiswa dalam pengawasannya, harus segera disampaikan kepada masyarakat. Manusia berelasi artinya manusia memberi ruang agar manusia lain memenuhi dirinya (Riyanto, 2017).

Dalam upaya memastikan kebenaran dalam Pemilu 2024, mahasiswa juga dapat

melakukannya dengan cara pendidikan bagi para pemilih. Masyarakat Indonesia secara umum masih dalam proses belajar terkait halnya dengan demokrasi. Oleh sebab itu, pendidikan dan pengajaran mengenai politik merupakan hal yang sangat penting bagi masyarakat. Mahasiswa dapat menyelenggarakan seminar, lokakarya, atau kampanye pendidikan pemilih untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya partisipasi aktif dalam Pemilu dan cara untuk melindungi hak suara mereka. Pendidikan pemilih yang dilakukan oleh mahasiswa dapat menciptakan pemilih yang lebih sadar, kritis, dan mampu membuat keputusan yang paling tepat. Mahasiswa juga ikut mengedukasikan kepada masyarakat untuk memilih pemimpin yang bersifat kapabel, bermoral, bersih, dan mau mengabdikan bagi bangsa. Pendidikan politik seperti ini diharapkan bisa mengurangi tindakan golput dari masyarakat, serta mengurangi praktik *money politic* (Sabiq, 2014).

Dalam menjalankan perannya sebagai agen kebenaran, mahasiswa dapat menggunakan keahlian hukum mereka untuk mendukung dan memastikan keadilan dalam proses Pemilu 2024. Hukum itu bersifat normatif dan selalu mencoba mencari unsur keadilan (Budiardjo, 2015). Oleh sebab itu, mahasiswa dapat membentuk tim hukum atau bekerja sama dengan badan hukum independen untuk menyelidiki potensi pelanggaran hukum yang dapat terjadi selama pelaksanaan Pemilu. Badan hukum adalah “sekelompok orang yang oleh hukum diperlakukan sebagai suatu kesatuan, yaitu sebagai suatu *person* yang mempunyai hak dan kewajiban” (Kelsen, 2021). Tindakan untuk menegakkan hukum seperti ini dapat menjadi langkah preventif dan korektif untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran akan mendapatkan sanksi yang pantas.

Pada prinsipnya pengawasan di dalam demokrasi idealnya dilakukan oleh masyarakat secara langsung. Istilah ini sering

disebut sebagai pengawasan partisipatif (Amal, 2021). Untuk mengoptimalkan peran mereka sebagai pengawas demokrasi, mahasiswa perlu menggunakan metode dan strategi yang paling tepat. Kolaborasi antarorganisasi mahasiswa, kerjasama dengan LSM yang peduli terhadap demokrasi, dan koordinasi dengan lembaga-lembaga pemantau Pemilu adalah contoh strategi yang efektif. Pemanfaatan *platform* digital dan media sosial juga dapat meningkatkan jangkauan informasi yang hendak mereka sampaikan kepada publik.

Dalam menghadapi Pemilu 2024, mahasiswa tidak hanya berperan menjadi saksi, tetapi juga ikut menjadi garda terdepan dalam memastikan kebenaran dan integritas proses demokrasi. Dengan peran yang proaktif dan strategi yang matang, mahasiswa diharapkan mampu menjadi kekuatan positif yang melindungi nilai-nilai demokrasi dan membawa perubahan yang berarti bagi masa depan bangsa dan negara.

#### **Integrasi Konsep Kebenaran Descartes dengan Peran Mahasiswa dalam Pemilu Indonesia Tahun 2024**

Perkembangan filsafat setelah munculnya pemikiran Rene Descartes terlihat pada dominasi penalaran dalam pergulatan filosofis. Dalam riwayat singkat kehidupan Descartes, ia memiliki pengalaman terkenal yang membawanya pada penemuan akan visi pencarian kepastian yakni melalui mimpi (Sitorus, 2016). Mimpi tersebut menjelaskan bahwa hal-hal yang bersifat nyata dalam mimpi, kenyataannya tidaklah demikian. Oleh karena itu, Descartes berusaha untuk meragukan segala hal dengan membangun sebuah sistem filsafat baru untuk mencapai kepastian pengetahuan dengan metode penalaran kritis (Kevin dan Riyanto, 2022).

Pemikiran Descartes tentang metode penalaran dan kepastian dapat diintegrasikan dengan peran mahasiswa dalam Pemilu 2024 di Indonesia secara menarik dan relevan. Descartes menekankan pentingnya

menggunakan keraguan skeptis dalam penalaran untuk mencapai kebenaran yang mutlak. Ia menjelaskan bagaimana cara membangun pengetahuan baru dan semua pengetahuan yang telah ada menjadi pasti dan menyatu, yakni dengan cara menaruh perhatian penuh (Copleston, 2021). Mahasiswa sebagai agen kebenaran dan pemikir muda dapat mengaplikasikan prinsip-prinsip ini dalam proses pelaksanaan Pemilu.

Descartes menekankan pentingnya metode penalaran yang sistematis. Mahasiswa bisa menerapkan pendekatan ini dalam memahami dan menilai program-program yang diusung oleh calon pemimpin. Mereka dapat menggunakan penalaran kritis untuk mengidentifikasi kesenjangan antara janji-janji kampanye, dan rencana konkret yang dapat diimplementasikan. Selain itu, Descartes juga memperkenalkan metode skeptisisme yang mempertanyakan segala hal sebelum menerima pengetahuan yang benar. Pemilu adalah masa yang penuh dengan ketegangan, dimana berita-berita palsu menyebar luas dengan cepat. Mahasiswa sebagai agen kebenaran mempunyai peran penting untuk mempertanyakan informasi yang mereka terima dari berbagai sumber. Mereka dapat mengkritisi retorika politik dan mencari fakta yang valid sebelum membuat pilihan dalam Pemilu.

Konsep Descartes tentang "*Cogito ergo sum*" atau "Saya berpikir, maka saya ada," dapat ditujukan kepada peran mahasiswa dalam Pemilu 2024. Mereka memiliki kemampuan untuk berpikir mandiri dan memahami pentingnya peran mereka sebagai warga negara yang berpikir kritis. Mahasiswa dapat menjadi agen perubahan dengan mempromosikan kesadaran politik di kalangan rekan mereka, mendorong partisipasi aktif dalam Pemilu, dan mengkampanyekan nilai-nilai moral dalam politik.

Descartes juga menyoroti pentingnya keragaman dan inklusi dalam mencapai kebenaran yang pasti. Salah satu prasyarat terwujudnya masyarakat modern yang demokratis adalah terwujudnya masyarakat yang menghargai kemajemukan (pluralitas) masyarakat dan bangsa serta mewujudkannya sebagai suatu keniscayaan (Achmad, 2021). Dengan latar belakang yang beragam, mahasiswa dapat membawa perspektif yang berbeda ke dalam proses Pemilu. Mereka juga didorong untuk mempromosikan inklusi dalam partisipasi para pemilih, mengajak pemilih-pemilih muda, minoritas, dan kelompok marginal untuk terlibat dalam proses demokrasi.

Selain itu, pendekatan Descartes tentang pentingnya menggunakan keraguan untuk mencapai kebenaran yang pasti dapat diaplikasikan untuk menilai integritas calon pemimpin. Mahasiswa bisa menggunakan pendekatan skeptis untuk mengevaluasi rekam jejak calon, mempertanyakan komitmen mereka terhadap nilai-nilai demokrasi, kejujuran, keadilan, dan akuntabilitas. Demikian pula dengan pemikiran Descartes tentang pentingnya logika dan rasionalitas dalam penalaran juga dapat digunakan oleh mahasiswa untuk mencegah propaganda dan permainan politik. Mereka bisa menggunakan logika dan penalaran yang rasional dalam memahami isu-isu yang kompleks dan menilai kebijakan-kebijakan secara objektif.

Integritas konsep Descartes dengan peran mahasiswa dalam Pemilu 2024 di Indonesia menawarkan kerangka kerja yang kuat bagi mahasiswa untuk menjadi agen perubahan yang kritis dan bertanggung jawab. Dengan menerapkan metode penalaran yang sistematis, skeptisisme yang bijaksana, dan promosi inklusi dalam proses demokrasi, mahasiswa bisa memainkan peran yang signifikan dalam membangun masa depan Indonesia yang lebih baik.

## PENUTUP

Pemilu 2024 di Indonesia menjadi momen penting dalam perjalanan demokrasi negara ini. Dalam tulisan yang membahas peran mahasiswa sebagai agen kebenaran berdasarkan konsep kebenaran Descartes, dapat ditarik kesimpulan bahwa mahasiswa memiliki potensi besar untuk memengaruhi kelancaran Pemilu 2024 dengan menerapkan prinsip-prinsip filosofis Descartes. Descartes menekankan pentingnya penalaran sistematis, skeptisisme yang bijaksana, dan pencarian kebenaran yang mutlak melalui logika dan rasionalitas. Dalam konteks Pemilu, mahasiswa sebagai agen perubahan (*agent of change*) berkesempatan untuk menerapkan prinsip-prinsip ini dalam proses politik.

Peran utama mahasiswa sebagai agen kebenaran adalah menggunakan penalaran kritis dalam mengevaluasi program-program dan janji-janji kampanye calon pemimpin. Dengan menggunakan logika dan penalaran rasional, mereka dapat menilai apakah program yang diusung oleh calon pemimpin sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat atau hanya merupakan retorika politik belaka. Skeptisisme yang bijaksana adalah kunci untuk menyikapi informasi yang tersebar selama kampanye. Mahasiswa harus mempertanyakan informasi yang diterima secara kritis, sehingga dapat membantu masyarakat dalam memilah informasi yang valid dari propaganda politik atau berita palsu (hoax). Hal ini sangat diperlukan untuk memastikan pemilihan yang didasarkan pada pengetahuan yang benar.

Selain itu, mahasiswa memiliki kapasitas untuk menjadi agen inklusi dalam proses demokrasi. Dengan mempromosikan partisipasi aktif dalam Pemilu, mereka dapat memotivasi dan menggerakkan kaum muda, kelompok minoritas, dan masyarakat kecil yang kurang terwakili untuk turut serta dalam pemilihan. Inklusi dalam Pemilu merupakan

prinsip yang sejalan dengan konsep kebenaran yang dipromosikan oleh Descartes.

Penerapan prinsip integritas dan moralitas dalam menilai calon pemimpin juga merupakan bagian dari mahasiswa sebagai agen kebenaran. Mereka berperan dalam mengevaluasi rekam jejak calon serta komitmen mereka terhadap nilai-nilai demokrasi, kejujuran, dan akuntabilitas. Dengan demikian, mahasiswa dapat memastikan pemilihan pemimpin yang sesuai dengan prinsip-prinsip etika.

Namun, ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi dalam menjalankan peran sebagai agen kebenaran dalam Pemilu. Salah satunya adalah ketidaksetaraan sumber daya antarpantai yang dapat mengganggu persaingan yang sehat. Mahasiswa juga harus mengatasi polarisasi politik dan politik identitas yang terkadang memengaruhi pemilihan. Pendidikan politik dan literasi informasi menjadi krusial untuk menghadapi tantangan ini.

Dalam keseluruhan, melalui pemahaman dan penerapan konsep kebenaran Descartes, mahasiswa memiliki potensi besar untuk menjadi agen kebenaran dalam menciptakan kelancaran Pemilu 2024 di Indonesia. Dengan menggunakan penalaran sistematis, skeptisisme yang bijaksana, promosi inklusi dalam proses politik, serta mempertimbangkan integritas dan moralitas calon, mahasiswa dapat memberikan kontribusi yang berguna untuk memastikan pemilihan yang adil, transparan, dan berdasarkan pada nilai-nilai demokrasi yang kuat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Nur. (2021). *Pluralitas Agama, Kerukunan dalam Keragaman*. Jakarta: Kompas.
- Adon, Mathias Jebaru. (2021). "Mahasiswa sebagai Agent of Changes dalam Mewujudkan New Normal sebagai Politik Bonum Commune di Masa Pandemi dalam Tinjauan Filsafat Politik Armada Riyanto". *JSSH: Jurnal Sains Sosial dan Humaniora*. 5(1):23-33.
- Adon, Mathias Jebaru. (2021). "Keterlibatan Masyarakat Desa Benteng Tado-Manggarai NTT dalam Pemilu bagi Kesejahteraan Sosio-Ekonomi Menurut Filsafat Politik Armada Riyanto". *Madani: Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*. 13(3):242-265.
- Akbar, Idil. (2016). "Demokrasi dan Gerakan Sosial: Bagaimana Gerakan Mahasiswa terhadap Dinamika Perubahan Sosial". *Jurnal Wacana Politik*. 1(2):107-115.
- Amal, Bakhrul. (2021). "Konsep Ideal Badan Peradilan Khusus Sengketa Hasil Pemilihan dan Pengaruhnya Terhadap Eksistensi Badan Pengawas Pemilihan Umum". *Jurnal Pengawasan Pemilu Provinsi DKI Jakarta*. :53-70.
- Amal, Ichlasul dan Armaidly Armawi. (2016). *Keterbukaan Informasi dan Ketahanan Nasional*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Bidja, Isnanto. (2022). "Fungsi Pengawasan Partisipatif Dalam Mewujudkan Pemilu Demokratis Tahun 2024". *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*. 6(1):2034-2041.
- Budiardjo, Miriam. (2015). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Cahyono, Habib. (2019). "Peran Mahasiswa di Masyarakat". *De Banten-Bode: Jurnal Pengabdian Masyarakat Setiabudhi*. 1(1):32-43.

- Copleston, Frederick. (2021). *Filsafat Rene Descartes*. Yogyakarta: Basabasi.
- Faradi, Abdul Aziz. (2019). “*Teori-Teori Kebenaran dalam Filsafat: Urgensi dan Signifikansinya dalam Upaya Pemberantasan Hoaks*”. *Jurnal Ilmu–Ilmu Ushuluddin*. 7(1):97-114.
- Kelsen, Hans. (2021). *General Theory of Law and State*. New York: Russel and Russel.
- Kevin, Alfredo dan Armada Riyanto. (2022). “*Panorama Eksistensi Kesadaran Cogito Ergo Sum menuju Cogito Ergo Zoom dalam Pembelajaran Online*”. *Jurnal Filsafat Indonesia*. 5(2):129-139.
- Kusuma, Ardli Johan, dkk. (2022). “*Sosialisasi Mekanisme Pemilu dan Menghindari Hoaks kepada Pemilih Pemula dalam Rangka Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pemilu 2024 di SMA Negeri 66 Jakarta*”. *Jurnal Pengabdian Masyarakat (JPM)*. 2(2):40-45.
- Martadinata, Arnan Muflihady. (2019). “*Peran Mahasiswa dalam Pembangunan di Indonesia*”. *Idea: Jurnal Humaniora*. 2(1):1-6.
- Pratama, Bima. (2019). “*Sosialisasi Efektivitas Pemilu dalam Memberikan Pemahaman Politik Guna Meningkatkan Kesadaran Berpolitik Masyarakat*”. *JPM: Jurnal Pengabdian Mandiri*. 2(5).
- Riani, Yanti, dkk. (2023). “*Sosialisasi Pelanggaran Politik dan Peran Masyarakat dalam Pengawasan Partisipatif Pemilu 2024*. *JPM: Jurnal Pengabdian Mandiri*. 2(6):1211-1217.
- Riyanto, Armada. (2017). “*Aku Indonesia, Aku Pancasila*”. *Seri Filsafat & Teologi*. 27(26):59-70.
- Russell, Bertrand. (2014). *Sejarah Filsafat Barat dan Kaitannya dengan Kondisi Sosio-politik dari Zaman Kuni hingga Sekarang*. terj. Sigi Jatmiko dkk. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sabiq, Ahmad Fikri. (2014). Artikel Pribadi berjudul “*Pendidikan Politik: Peran Mahasiswa dalam Pemilu 2014*”.
- Santoso, Rudi. (2019). “*Peran Komisi Pemilihan Umum dan Partai Politik dalam Mewujudkan Demokrasi Berintegritas*”. *Jurnal Nizham*. 7(2):252-261.
- Sitorus, F. Kennedy. (2016). *Saya Berpikir, maka Saya Ada*. Jakarta: Makalah Kelas Filsafat, Komunitas Salihara.
- Sorensen, Georg. (2015). *Demokrasi dan Demokratisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sukmawati, Adina dan Al Rafni. (2020). “*Peran Organisasi Kepemudaan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dalam Melaksanakan Pendidikan Politik Bagi Pemuda di Kota Padang*”. *Journal of Civic Education*. 3(2):191-199.
- Sumadi, Ahmad Fadlil. (2015). “*Hukum dan Keadilan Sosial dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan*”. *Jurnal Konstitusi*. 12(4):849-871.